BAB II

KEMENANGAN PARTAI AKP DAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI DI BAWAH KEPEMIMPINAN PARTAI *ADALET VE KALKINMA PARTISI* (AKP)

Sebelum Republik Turki terbentuk, dahulu Turki merupakan negara Imperium Khilafah Ottoman yang memiliki sejarah panjang dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di belahan dunia. Di zaman Khilafah Ottoman kekuatan Islam sangat kuat dan juga sangat diperhatikan, akan tetapi ketika Khilafah telah runtuh perhatian Turki terhadap dunia Islam tidak seperti di zaman Ottoman, Turki di bawah Mustafa kemal Attaturk terlihat mulai mengisolasi diri terhadap kawasan Timur dan cenderung dekat terhadap bagian barat.

Saat ini negara Turki merupakan negara yang memiliki Ideologi Sekuler yang di warisi oleh Mustafa Kemal Pasha, penjaga dari ideologi Sekuler ini adalah militer, sehingga jika ada Partai ataupun pihak yang menghalangi Ideologi Sekuler, maka tugas militer adalah melindungi ideologi tersebut. Banyak Partai yang telah di kudeta oleh Militer karena dianggap menghalangi jalannya sekuleris di Turki, akan tetapi dampak dari kudeta yang yang sering dilakukan militer akhirnya melahirkan Partai baru yang mampu mengkombinasikan antara keinginan rakyat dan juga militer karena belajar dari pengalaman dari partai-partai sebelumnya, partai ini adalah partai *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) yang di pimpin Recep Tayyip Erdogan.

A. Sejarah berdirinya Partai *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP)

Turki merupakan sebuah Negara yang memiliki letak geografis yang strategis karena berdiri di antara benua Asia dan benua Eropa dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Walaupun masyarakat Turki mayoritas adalah beragama Islam, tetapi Turki bukanlah Negara yang secara resmi menyatakan diri sebagai Negara Islam, melainkan menyatakan diri sebagai Negara Republik.

Ketika dunia perang I berhasil dimenangkan oleh Turki dan sekutu dan harus menandatangai perjanjian Sevres namun golongan nasionalis Turki tidak setuju karena merugikan pihak Turki dan yang akhirnya digantikan oleh perjanjian Lausanne, didalam salah satu perjanjiannya Turki ingin melepas semua wilayah yang penduduknya bukan bangsa Turki, seperti Lybia diserahkan ke Italia, dan palestina, Trans-Jordania, Syiria, Libanon, Mesir, Iraq, dan Cyprus diserahkan ke Inggris. Di bawah pimpinan Kemal, Turki tidak begitu memperioritaskan terhadap masalah-masalah dunia Islam dan wilayah-wilayah Islam seperti di zaman Ottoman. Sistem politik yang dijalankan oleh Kemal dan partainya sangat Diktator. Sehingga muncul pemberontak dari suku Kurdi dan kelompok kecil imigran, namun tetap tidak menggoyahkan pemerintahan Kemal. Dan juga beberapa daerah seperi Paris, Sofia, Damaskus dan juga Kairo yang memiliki politik bercorak Islamis melakukan serangan terhadap pemerintah dalam pamflet-pamflet akan tetapi serangan tersebut tidak berpengaruh terhadap partai yang sedang berkuasa pada saat itu. (Solikhun, 2013, hal. 5-6)

Bahkan sebelum lahirnya republik, peran agama hanya sebatas pada ruang lingkup keluarga dan diberlakukannya sebuah UU Perdata Swiss dan UU pidana Italia pada tahun 1926. UU pidana melarang adanya pembentukan dan perkumpulan yang berbasis agama. Pendekatan dan budaya Barat yang mulai ditiru Turki ini tidak hanya membuat Turki memiliki citra Barat tetapi juga membuat komunikasi dengan dunia Eropa menjadi lebih mudah dan ini merupakan salah satu langkah Turki untuk memutuskan jalinan masyarakat Turki dengan tradisi Islam Usmani maupun Timur Tengah dan juga keterkaitannya dengan Dunia Islam. (ZA, 2016, hal. 138-140)

Berdirinya Turki sebagai Negara Republik di karenakan runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah yang dipimpin oleh salah satu tokoh dengan kharismatik dan pengaruh yang sangat kuat di Turki, tokoh ini adalah Mustafa Kemal Attaturk atau Mustafa Kemal Pasha. Mustafa Kemal dianggap sebagai pahlawan karena membentuk Dewan Agung Nasional dan menjaga perdamaian di Turki pasca perang dunia I kemudian pada tanggal 1 November 1922 Kemal menghapuskan kekhalifahan di Turki dan pada tanggal 29 Oktober 1923 ia memproklamirkan terbentuknya Negara Republik Turki (Ramadanti, 2014)

Kemal memiliki tiga prinsip pembaharuan yaitu Nasionalisme yang terinspirasi dari pemikiran Ziya Gokalp untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki. Unsur Sekulerisme diambil karena menurut pandangannya agama hanya akan membuat kemunduran bangsa. Kemudian unsur Westernisasi diambil karena menurutnya Turki harus berorientasi ke Barat yang mampu mengalahkan peradaban lain, di mana peradaban barat yang maju akan ilmu pengetahuan,

teknologi dan berbagai macam unsur lainnya. Dari ketiga prinsip tersebut melahirkan sebuah ideologi Kemalisme yang didalamnya terdiri atas Republikanisme sebagai pedoman Negara yang berbentuk republik. Nasionalisme digunakan sebagai paham untuk mempersatukan bangsa. Populisme (kerakyataan) yaitu merupakan oposisi solidaristik terhadap status hak-hak khusus dan monarki. Laisisme berarti kebijakan yang tidak berdasar pada agama. Dan Estatisme yaitu kebijakan ekonomi yang diatur dan diselenggarakan oleh negara. (Fuqon, 2012, hal. 62-63)

Pada kepemimpinan Mustafa Kemal, segala aspek kehidupan di Turki mengalami perubahan besar-besaran dikarenakan Ideologi yang dibawanya. ideologi tersebut meruntuhkan identitas muslim Turki di karenakan adanya pengaruh kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal yang pada akhirnya mengubah posisi Islam di Turki, bila sebelumnya posisi Islam berperan total dalam masyarakat Turki, maka di zaman ini peran Islam menjadi sangat minim dan ditekan. Pasca era Mustafa Kemal Pasha, terjadi peralihan Turki ke sistem multi-partai pada tahun 1946, militer tetap dominan menjaga sistem politik demokrasi yang mengakibatkan setiap kemenangan partai politik yang berbasis Islam di Turki akan selalu diikuti upaya kudeta dan pembubaran partai politik oleh militer. (Ayu, 2012)

Pada tahun 1983 berdiri sebuah partai yang berbasis Islam yaitu Partai Refah (Refah Partisi) yang masuk kedalam perpolitikan Turki yang di inisiasi oleh 3 orang yaitu Ali Turkmen, Ahmet Tekdal dan dipimpin oleh Necmettin Erbakan. Tujuan didirikan Partai ini di karenakan mereka menentang dasar-dasar Republik

yang didirikan oleh Mustafa Kemal Pasha, dan mereka menginginkan membangun sebuah peradaban baru yang dapat bersaing dengan peradaban barat. (Pranantha, 2014)

Didalam Partai Refah ada salah satu anggota yang berbakat dan memiliki karir yang cemerlang yaitu Recep Tayyip Erdogan. Erbakan dan Erdogan bertemu pada saat Erdogan masih duduk di bangku kuliah, pertemuan ini membuka cara pandang dan berfikir Erdogan tentang politik, Erdogan mulai mengenal organisasi dan belajar politik bersama Partai Keselamatan Nasional, kemudian pada tahun 1975 Erdogan dipercayai untuk menjadi Ketua dalam bidang kepemudaan Partai tersebut hingga tahun 1980, setelah itu partai ini mulai dibekukan oleh militer.

Di tahun 1983 setelah terbentuknya Partai Refah, Erdogan juga dipercayai untuk menjadi ketua Cabang Partai ini di wilayah Cosmopolitan Beyoglu, yang merupakan salah satu kota terbesar di Istanbul pada tahun 1984, kemudian pada tahun 1985 Erdogan menjadi ketua Cabang Partai ini di wilayah Istanbul dan diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Partai pada tahun 1986. Erdogan menjadi calon anggota Parlemen partai ini sebanyak dua kali pada tahun 1987 dan 1991, akan tetapi pencalonannya gagal karena tidak terpilih, namun Erdogan terpilih sebagai walikota untuk wilayah Istanbul Raya dan menjadi Presiden Dewan Metropolitan Istanbul Raya pada tahun 1994. (Taghian, 2016, hal. 16)

Pada tahun 1995 Partai Refah berhasil memenangkan sebuah pemilihan Nasional kemudian Necmettin Erbakan berhasil naik sebagai Perdana Menteri. Refah sukses mempopulerkan kembali Islam di Turki. ia juga melakukan langkah-langkah reformasi lain, seperti halnya bertemu dengan oposisi dari militer dan

media sekuler. akhirnya pada tahun 1997 karena ada tekanan dari pihak militer, Erbakan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, pengadilan tertinggi Turki menutup partai yang ia pimpin dan melarang anggotanya untuk melakukan kegiatan politik. pengadilan Konstitusi Turki menganggap Partai Refah merupakan *"a centre of activities contrary to the principles of secularism*". Atau melakukan tindakan yang menentang prinsip-prinsip sekuler. (Pranantha, 2014)

Pada tahun yang sama dengan pembubaran Partai Refah, Erdogan dibawa ke pengadilan dengan tuduhan pelanggaran Undang-undang pidana, dimana undang-undang itu diberlakukan bagi orang yang melakukan pembangkitan diskriminasi Etnis atau agama di Turki, tuduhan yang di berikan kepada Erdogan karena kutipan bait-bait puisi penyair Ziya Gokalp yang dibacakan dengan suara lantang di sela-sela Konferensi Umum Partai Refah di kota Sard di Tenggara Anatoli, dalam baitnya-bait puisinya mengatakan *"Minareler süngü, kubbeler miğfer Camiler kışlamız, mü'minler asker Bu iláhi ordu dinimi bekler Allahu Ekber, Allahu Ekber"* yang artinya,

Masjid adalah barak kami,

Kubah adalah helm kami,

Menara adalah bayonet kami,

Orang-orang beriman adalah tentara kami,

Tentara ini menjaga agama kami,

Perjalanan suci kamu adalah takdir kami,

Akhir perjalanan kami adalah syahid. Allahu Akbar! Allahu Akbar! (Nuh, 2009)

Bait-bait puisi tersebut sebenarnya banyak disebutkan dalam buku-buku sekolah yang diajarkan di sekolah negeri, akan tetapi menjadi hal yang berbeda jika bait-bait tersebut disampaikan oleh seorang politikus yang bisa menyebabkan perpecahan kelompok dan agama, pengadilan menganggap bait tersebut telah memprovokasi rakyat untuk membangkitkan rasa keberagamaan.

Di dalam penjara bukan berarti mematikan pemikiran-pemikiran Erdogan yang berjuang untuk negerinya, selama empat bulan dipenjara ternyata memberikan pengaruh yang baik bagi Erdogan dan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri bersama sahabat perjuangannya Abdullah Gul, mereka berusaha untuk memikirkan cara baru untuk merealisasikan ide-ide reformasi, mereka sadar bahwa partai Refah memiliki kesalahan fatal yaitu berseteru dengan Negara dengan menggunakan semboyan-semboyan keagamaan dalam masalah politik, sebagaimana bertentangan dengan sekulerisme Ataturk dan hal ini yang menyebabkan partai-partai Islam di kudeta salah satunya partai Refah itu sendiri. Setelah partai Refah di kudeta oleh militer, anggota dari partai Refah yang bernama Rajai Kutan membentuk partai baru yang diberi nama partai Fadhilah yang merupakan jelmaan dari partai Refah, Rajai Kutan mendirikan partai tersebut bertujuan agar Erbakan masih bisa memegang kendali partai karena ia dilarang melakukan aktifitas dimasa kepemimpinannya.

Namun, pada tanggal 8 Mei 1999 Mahkamah Konstitusi membubarkan partai Fadhilah, bubarnya partai Fadhilah membuat para dewan wakil rakyat terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang tetap mempertahankan partai Sa`adah dan kelompok kedua adalah kelompok pemuda

pembaharuan seperti Recep Tayyeb Erdogan dan Abdullah Gul, mereka mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dibawah kepemimpinan Erdogan pada tanggal 14 Agustus 2001 beberapa bulan setelah kelompok lain mendirikan Partai Sa`adah. (Taghian, 2016, hal. 29-32)

B. Kemenangan Partai *Adalet ve Kalkinma partisi* (AKP)

Partai AKP secara resmi memasuki arena politik pada tanggal 14 Agustus 2001, sang pendiri partai yaitu Erdogan mengajukan diri sebagai calon anggota dewan pada pemilu 2002. Akan tetapi, Kejaksaan Agung meminta pengadilan Diyarbakir untuk menolak tentang pencoretan hukuman tahanan terhadap Erdogan dari catatan Undang-undang pidana, yang tujuannya juga untuk mencegah Erdogan maju di Legislatif, dan tidak bisa ikut berpolitik selama tiga tahun sebelum hukumannya selesai. Pada tanggal 20 Oktober 2002 Erdogan mengundurkan dirinya dari Komite pendiri Partai sebagai bentuk menjalankan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk Partai dan Erdogan pada bulan april 2002. Mahkamah konstitusi Turki mengeluarkan keputusan dengan memberikan izin kepada Erdogan untuk melanjutkan memimpin Partai AKP dengan jaminan bahwa harus mengajukan pembelaan-pembelaanya secara hukum setelah dua minggu dalam dakwaan khusus untuk ditutup, hal ini menghalangi Erdogan untuk tidak bisa masuk menjadi anggota parlemen dan juga menjadi Perdana menteri setelah partainya memenangkan pemilu. (Taghian, 2016, hal. 33)

Partai AKP mulai mengikuti pemilu pada tanggal 3 November 2002 dan partai ini memenangkan pemilu untuk pertama kalinya, ini merupakan sebuah

peristiwa yang bersejarah dalam di dunia perpolitikan yang ada di Turki, karena mereka merupakan Partai baru yang belum genap setahun tetapi berhasil memenangkan pemilu, partai AKP mampu mengalahkan partai-partai Nasionalis dan Sekuler.(Nuh, 2009)

Tabel suara pemilu parlemen pada tahun 2002

Nama Partai	Votes Gained (Perolehan suara)	Percentage of Votes (Persentasi Suara)	Seats in the Parliament (Kursi di Parlemen)
Adalet ve Kalkinma Partisi	34,41	10.804.458	365
Cumhuriyet Halk Partisi	19,42	6.096.488	177
Dogru Yol Partisi (DYP)	9,55	2.997.065	-
Milliyetci Hareket Partisi	8,33	2.613.936	-
Genc Parti (GP)	7,25	2.275.855	-
Demokratik Sol Halk Partisi	6,14	1.929.004	-
Anavatan Partis	5,10	1.601.322	-
Saadet Partisi (SP)	2,48	779.934	-
Demokratik Sol Partisi	1,23	385.714	-
New Turkey Party (YTP	1,15	360.678	-
Buyuk Birlik Partisi (BBP)	1,02	319.622	-
Independents	0,96	301.359	8
Homeland Party (YP)	0,94	294.167	-
Isci Partisi (IP)	0,52	162.908	-
Bagimsiz Turkiye Partisi	0,48	149.445	-
Ozgurluk ve Dayanisma Partisi (ODP)	0,34	105.849	-
Liberal Demokrat Parti	0,28	89.503	-
Millet Partisi (MP)	0,22	69.340	-
Turkiye Komunist Partisi	0,19	60.410	-

Sumber :
http://digilib.uinsuka.ac.id/2543/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Ini merupakan sebuah kemenangan yang gemilang, dimana partai AKP ini bisa mengatur pemerintahannya sekarang, meskipun Erdogan tidak bisa langsung memimpin sendiri pemerintahanya karena konsekuensi hukuman yang diberikan, untuk itu Erdogan memberikan tugas kepemimpinannya kepada Abdullah Gul untuk mewakilkannya dari tanggal 16 November 2002 hingga 14 Maret 2003, sampai larangan beraktifitas politik Erdogan dicabut, ketika larangannya telah di cabut, Erdogan kemudian menerima kembali jabatannya sebagai Perdana Menteri. (Kabar Oku Timur, 2016)

Kemenangan yang mereka raih tentu di respon kurang baik oleh partai oposisi, kubu sekuleris memberikan sebuah kabar bahwa Partai AKP memiliki sebuah agenda yang tersembunyi di balik program-programnya dengan tujuan untuk menyingkirkan nilai-nilai sekulerisme di Turki yang telah lama ada. Namun, Partai AKP menyatakan bahwa partainya tidak lagi memiliki hubungan baik secara struktural maupun idelogi dengan pendahulunya yang bertentangan dengan ideologi sekuler, saat ini mereka merupakan kelompok yang lebih moderat dan tidak sama dengan partai-partai Islam seperti pendahulunya. Sebagian besar pengamat melihat bahwa faktor utama kemenangan AKP sejak berkuasa adalah keberhasilan Partai tersebut menampilkan citra yang baik dengan Partai yang menawarkan solusi terhadap permasalahan sosial-ekonomi dan tidak korupsi. (Fiansyah & Basyar, 2013)

Kemenangan dapat diraih karena Partai AKP ini merupakan partai yang lebih moderat dan dapat menyesuaikan diri dengan kultur demokrasi militeristik dan dengan pengaruh Erdogan sebagai pemimpin beragama Islam yang taat

sebagaimana identitas mayoritas masyarakat Turki juga beragama Islam maka identitas ini menjadi sebuah nilai tambahan bagi partai ini untuk berkuasa. (Rofii, 2008, hal. 7)

Akan tetapi, meskipun pemimpin AKP merupakan seorang Muslim yang taat dan citra partai AKP masih dipandang sebagai partai Islam karena sebagian anggotanya merupakan mantan dari partai Islam (Refah), AKP berusaha untuk mengubah pandangan tersebut dengan tidak menempatkan Islam sebagai isu utama dalam berpolitik seperti yang disampaikan oleh tokoh AKP Mehmet Muezzinoglu yang menjabat sebagai ketua AKP di Istanbul dalam pidatonya ia mengatakan : *"AKP is not a religious party. But it is a parti in which religious people can free at home, can feel at peace".* Partai ini berusaha untuk merubah citranya bukan sebagai partai Islam, mereka menyebutkan identitas mereka sebagai demokratis konservatif. Namun dengan pernyataan-pernyatan seperti ini bukan berarti partai AKP menghilangkan isu-isu tentang Islam didalam perpolitikannya, karena identitas masyarakat Turki yang mayoritas Islam tentu ingin adanya sebuah kebebasan beragama dan sama halnya dengan masyarakat dan militer yang pro akan sekuler agar tetap menghormati nilai-nilai sekuler, hal ini menjadi sebuah tantangan baru bagi partai AKP untuk memadukan kedua hal yang kontradiktif dan uniknya partai ini bisa mengkombinasikan kedua ideologi tersebut, AKP membuat paradigma baru bahwa religiusitas tidak selamanya bertentangan dengan sekulerisme. (Ayu, 2012)

Pada tanggal 22 Juli 2007 Abdullah Gul yang merupakan kandidat dari Partai AKP sebagai Calon Presiden berhasil memenangkan pemilihan umum

Presiden, kemenangan ini berhasil mengantarkan Gul sebagai Presiden Turki yang ke-11, kemudian Erdogan diangkat menjadi Perdana menteri. AKP mendapat 47% suara dan hanya mendapatkan 341 kursi, keberhasilan ini tentunya di tandai dengan faktor-faktor yang paling menonjol yaitu apresiasi publik terkait persoalan pemulihan ekonomi di Turki, ketika AKP memegang kekuasaan, partai ini langsung dihadapkan dengan persoalan utang luar negeri Turki. Namun, dengan langkah-langkah yang efektif untuk menangani krisis tersebut AKP melakukan kebijakan privatisasi secara bijak di berbagai industri, mempromosikan globalisasi, dan mengikatkan kebijakan ekonomi. Alhasil, Turki berhasil memulihkan dan mengembangkan perekonomian secara pesat. (Alfian, hal. 100-102)

Faktor lain yang menyebabkan kemenangan Turki ini juga didasari dengan kemampuan Partai AKP yang meyakinkan berbagai kelompok contohnyanya seperti mengatasi problematika suku Kurdi dengan cara mengakui identitas kebudayaan dan kemanusiaan di suatu masyarakat pada suatu daerah, hal ini mendapat respon positif oleh suku Kurdi yang menjadi nilai tambahan Partai AKP untuk memperoleh dukungan lebih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. (Taghian, 2016, hal. 37-39)

Pada tahun 2011 kejayaan AKP masih berlanjut dengan presentase kemenangan 50% dan mendapatkan 327 kursi parlemen kemudian kemenangan di dua kali referendum hingga kemenangannya di pilpres pada 28 agustus tahun 2014, kemenangan pada pemilu ini mendapatkan suara sekitar 51% dan menjadikan Erdogan sebagai Presiden di Turki. Pemilu legislatif selanjutnya yang

di adakan pada bulan juni 2015 Turki berhasil mendapatkan 41,21% dengan 259 kursi di parlemen meskipun mendapat suara tertinggi, AKP tetap tidak dapat membentuk pemerintahan mayoritas karena masih kekurangan 17 kursi lagi, sementara 3 partai lain yang lolos ke parlemen yaitu CHP, MHP dan HDP yang menyatakan tidak mau berkoalisi dengan AKP.

Jadi, AKP telah mengikuti : Pemilihan Legistalif pada tahun 2002 (34%), 2007 (40%), 2011 (50%), 2015 (41,21%). 3 kali pemilu lokal (40%, 38%, 45%), 2 kali referendum (68% dan 58%) serta pilpres pada tahun 2007 (47% suara) dengan Abdullah Gul sebagai presiden dan tahun 2014 (52% suara)Erdogan terpilih menjadi presiden. (Soekanto, 2015)

C. Perubahan Politik Luar Negeri Turki di bawah partai AKP

Turki merupakan Negara yang terbentuk setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Turki terbentuk sebagai Negara Republik Konstitusional yang dibawa oleh Mustafa Kemal Pasha. Letak geografis Turki berada di antara dua benua Eropa dan Asia. Akan tetapi, Turki memiliki hubungan yang lebih erat ke bagian Eropa ketimbang ke bagian Asia, kedekatan ini bisa dilihat ketika Turki berupaya agar menjadi anggota tetap Uni Eropa, selain itu Turki juga membangun kedekatannya dengan Negara bagian Barat dengan bergabung ke dalam NATO *(North Atlantic Treaty Organization).* Kedekatan Turki dengan Dunia Barat membuat Turki mengadopsi model *Laicite* yaitu model yang mengedepankan prinsip sekulerisme, prinsip ini memisahkan antara pemerintahan dengan agama.

Politik Luar Negeri Turki sebelum berkuasanya partai AKP sangat dipengaruhi oleh ideologi Kemalis, Politik Luar Negeri Turki pada saat itu

memiliki prinsip *"Peace in the home, peace in the world"* serta prinsip Westwatd yaitu kedekatan yang lebih condong kearah barat dan tujuannya untuk melakukan westerninasi di Turki. Pada tahun 2001 partai AKP yang merupakan partai baru, namun berhasil menjadi pemenang pada pemilu pada tahun 2002. Kemenangan Partai ini tentu membawa perubahan Politik Luar Negeri Turki terhadap Negara-negara lain. Pergeseran arah orientasi Politik Luar Negeri Turki yang pada awalnya Pro-Barat kemudian mulai bergeser secara perlahan ke Negara Dunia Timur. Tidak hanya ke bagian Timur akan tetapi Turki juga tertarik untuk meningkatkan Hubungannya ke daerah Asia. Karena semasa kekuasaanya Ataturk kurang memberikan perhatiannya terhadap negara-negara di wilayah Asia dan Timur Tengah yang menyebabkan minimnya hubungan bilateral Turki ataupun multilateral (Taradewi, Wiranata, & Parameswari, hal. 1-3)

Keanggotaan Uni Eropa yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama Politik Luar Negeri Turki dan juga sebagai manifestasi ide politik identitas Turki sebagai negara Eropa tidak terdengar lagi setelah stagnasi negosiasi keanggotaan Uni Eropa di tahun 2008 kemudian Turki secara terbuka mengembangkan peran Politik Luar Negerinya ke regional Timur tengah, khususnya dalam persitiwa *Arab Spring*. (Putra, 2013)

Identitas Politik Luar Negeri Turki yang baru juga terlihat ketika Ahmet Davutoglu sebagai menteri Luar Negeri yang menggunakan doktrin *"Strategy Depth"*. Doktrin ini sebenarnya merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Davutoglu dengan judul *"Strategik Derinlik, Turkiye'nin Uluslararasi Konumu* (Strategi Mendalam, Posisi internasional Turki)". Davutoglu berpendapat bahwa

kebijakan Politik Luar Negeri Turki telah lama tidak seimbang karena penekanan yang berlebihan terhadap Eropa Barat dan Amerika Serikat tetapi mengabaikan kepentingan Turki dengan Negara-negara lainnya. Visi Davutoglu adalah menampilkan karakteristik Neo-Ottomanism untuk menemukan kembali warisan kekaisaran dan mencari identitas nasional baru Turki yang dapat hidup berdampingan, visi ini sudah dibangun sejak era mantan Presiden Turgut Ozal. Pemimpin AKP saat ini ingin menjangkau Timur Tengah untuk melengkapi hubungan mereka dengan Barat bukan untuk menggantikannya, *Strategy Depth* yang digunakan saat ini berbeda dengan pada masa Necmettin Erbakan pada tahun 1970, yang ingin menciptakan aliansi Islam dengan negara-negara Islam lainnya. (Ningsih, 2011, hal. 4-5)

Doktrin *"Strategic Depth"* yang dirumuskankan oleh Ahmed Davutoglu menegaskan bahwa Turki telah menjadi kunci. Dengan memanfaatkan geopolitik dan geografisnya, Turki ingin menjadi aktor regional dan global, tujuannya untuk menerapkan kebijakan yang mengakhiri permusuhan jangka panjang dengan tetangganya, terutama di kawasan Timur Tengah yang pernah dikuasai pada masa Dinasti Ottoman. Kemenangan partai AKP juga mengubah kebijkan luar negeri Turki dari politik dimensional menjadi multidimensional. Dengan kata lain *Strategic Depth* adalah pendekatan politik luar negeri multidimensional yang berpijak pada pemahaman atas akar sejarah dan posisi geostrategis Turki. Dan salah satu poin penting menggunakan doktrin ini adalah gagasan untuk meminimalisir atau menghilangkan sama sekali segala masalah dengan tetangga atau yang dikenal dengan istilah *Zero Problems with Neighbors Policy*, karena

menurut Davutoglu, kepentingan strategis Turki terletak pada perdamaian, stabilitas, keamanan, kemakmuran di kawasan dan sekitarnya.

Davutoglu juga mengklaim, “pada tingkat global negara-negara bukan lagi entitas yang terisolasi, kita hidup di dunia dimana negara, para pemimpin serta rakyat semakin berinteraksi satu sama lain setiap hari. Ini adalah tatanan global baru dan Turki melakukan terbaik untuk berkontribusi. Dalam hal ini, kami percaya bahwa sistem baru harus sah, adil, transparan dan demokratis sepenuhnya terbuka untuk partisipasi dan menyelesaikan sengketa secara aktif akan berdampak pada stabiilitas dunia dan mengahpus kesenjangan”. Upaya Turki di fokuskan pada membawa bersama-sama para pihak dalam rangka memecahkan atau mengakhiri konflik, memperjuangkan nilai-nilai universal dan hak asasi manusia, mendukung mereka yang mengalami perlakuan tidak adil, dan mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara miskin yang berarti Turki ingin memainkan peran penting dalam tatanan global baru. (Iran Indonesia Radio, 2013)

Partai AKP mampu mengembalikan kedudukan dan Hubungan internasional Turki yang strategis, yang dibangun setelah Republik Turki berdiri di atas dasar keselamatan eksistensi baru Turki yang terlahir dari Kesultanan Utsmani dan menghindari konfrontasi, dibawah partai AKP, Turki menempatkan dirinya sebagai pusat aktifitas dan sebagai jebatan penghubung di kawasan Barat dan Timur. Ini berarti Turki memperluas jangkauan wilayah hubungan luar negerinya yang mencakup sejumlah negara Barat. Terutama yang memiliki ikatan geopolitik, kebudayaan, dan sejarah. Turki menjadi poros bukan hanya dalam

pengertian geografinya saja, melainkan dari segi historis, kebudayaan, dan nasionalisme serta berhubungan erat dengan negara-negara Kaukaus, Asia Tengah, Balkan, Timur Tengah. Dengan memperkuat hubungannya dengan negara-negara di kawasan tersebut tanpa meninggalkan hubungan tradisionalnya dengan Barat.

Berarti politik multi-dimensional bukan berarti terpisah dari tradisi politik luar negeri Turki sebelumnya, melainkan menjaga kedudukan dan kepentingan politik luar negeri Turki dimasa lalu bersamaan dengan perluasan wilayah politik ini untuk menjangkau daerah-daerah dan beberapa kawasan yang dahulunya dikuasai selama pemerintahan Partai Rakyat Republika. Diplomasinya berupaya mengkomparasikan antara realita politik dan orisinalitas ideologi. Strategi Politik Luar Negeri Turki ini bertumpu pada dua pondasi utama; Pertama untuk membersihkan dan mengkondusifkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Regional. Pondasi kedua tercermin dalam strategi intensif, yang menyerukan menciptakan peran politik, ekonomi dan kebudayaan Turki yang signifikan dan berpengaruh di kawasan regional. (Taghian, 2016, hal. 251-266)

Intinya Doktrin *Strategy Depth* ini memiliki empat prinsip utama yaitu : 1. *Zero Problem With Neighbours* (Tidak memiliki masalah dengan tetangga), 2. *Outreach To Adjacent Regions* (Menjangkau wilayah-wilayah yang berdekatan), 3. *Multi-dimensional Foreign Policy* (Kebijakan luar negeri Multi-dimensional) dan *Rhythmic Diplomacy* (Diplomasi berirama yang maksudnya adalah Diplomasi

yang di mainkan oleh Turki agar aktif dalam berbagai macam forum internasional). (Ningsih, 2011, hal. 48)

Politik Luar Negeri di masa Kemal Ataturk yang bersifat rasional sesuai dengan kebutuhan dan pemimpin dari pemerintahan tersebut, sekulerismenya menginginkan Turki menjadi sebuah negara yang maju sesuai dengan barat, namun langkahnya gagal di karenakan ketidak nyamanan warga Turki dengan Kemalisme. Jika dibandingkan dengan Politik Luar Negeri dibawah kekuasaan partai AKP, pemerintahan berhasil mengembalikan kembali Turki menjadi negara yang sejahtera dan aman, partai ini juga bersifat flexibel, mampu beradaptasi dengan keinginan rakyat dengan mengkombinasikan Sekuler, Islam dan Demokrasi. Partai AKP menginginkan adanya keseimbangan antara keamanan dan demokrasi didalam negara. Turki beranggapan bahwa pemenuhan kebutuhan akan keamanan merupakan hak dasar bagi setiap para warga negara, yaitu kebebasan dan HAM. Setelah Turki berhasil menciptakan keamanan dan kebebasan didalam negerinya, Turki kemudian menciptakan sebuah Politik Luar Negeri yang merepresentasikan bahwa mereka ingin menciptakan keamanan secara wilayah dan global. (Pradana, 2015)